

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak adalah *tax ratio*, yaitu perbandingan jumlah pajak yang diperoleh atau dikumpulkan pemerintah dengan jumlah pendapatan domestik bruto dalam satu tahun fiskal. Semakin besar *tax ratio* mengindikasikan semakin besar porsi penerimaan pajak dalam APBN. Salah satu yang mempengaruhi penerimaan negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Kontribusi ini juga meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak secara keseluruhan. Peningkatan target penerimaan pajak ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam hal pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunannya atau dalam arti tidak tergantung dari pinjaman luar negeri. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%, tarif pajak 0% juga diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Pihak yang wajib menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak, dan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami peningkatan berdasarkan data dari KPP Pratama Jambi pada tahun 2011 penerimaannya sebesar 672.553.773.931, tahun 2012 sebesar 686.955.716.585, pada tahun 2013 sebesar 816.656.064.794 dan untuk tahun 2014 penerimaan pajak sebesar 884.497.142.813. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai cenderung terus meningkat tiap tahunnya, berarti pajak pertambahan nilai memiliki kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara. Pola konsumtif masyarakat membuat sektor industri dan perdagangan memegang andil yang cukup besar sebagai sumber penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tetapi meskipun penerimaannya meningkat setiap tahunnya, namun persentase untuk penerimaan PPN mengalami fluktuasi untuk setiap tahunnya, untuk tahun 2011 persentase penerimaan PPN sebesar 103,03%, sedangkan untuk tahun 2012 persentase penerimaan PPN sebesar 106,05%, dan untuk tahun 2013 penerimaan PPN di KPP Pratama Jambi mengalami penurunan sebesar 98,35% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 96,23%.

Berikut disajikan tabel rencana dan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Jambi:

**Tabel 1.1**  
**Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP**  
**Pratama Jambi Periode 2011-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Rencana (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2011	652.741.212.905	672.553.773.931	103,03
2012	705.128.439.591	750.955.716.591	106,05
2013	830.316.122.523	816.656.064.794	98,35
2014	919.115.446.677	884.497.142.813	96,23

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2011 dan tahun 2012 persentase realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai melebihi rencana. Hal ini menunjukkan KPP mampu mencapai rencana yang diberikan oleh DJP. Sedangkan untuk tahun 2013 dan 2014 belum melampaui target yang ditentukan. Angka penerimaan pajak kota Jambi mengalami pergerakan yang fluktuatif dan memiliki selisih antara jumlah target dan realisasi penerimaan pajaknya. Dari selisih tersebut dapat diketahui bahwa antara target dan penerimaan pajak secara persentase dapat mencerminkan besarnya sejumlah penerimaan pajak yang hilang karena adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak, yang bentuknya berupa penghasilan yang tidak dilaporkan maupun pengurangan penghasilan yang lebih dilaporkan.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini menurut Wiko Saputra yang dikutip dari ([www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com)) mengatakan bahwa:

“ Realisasi penerimaan pajak 2014 merupakan capaian terendah selama 25 tahun terakhir. Realisasinya hanya mencapai Rp1.143 triliun atau sekitar 91,75 persen. Pasalnya, selama ini pajak sangat berkontribusi besar dalam APBN sebesar 70-80 persen. Tanpa ada peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, pemerintah akan sulit untuk mempunyai sumber pembiayaan yang memadai,” katanya.

Perlu diketahui, tahun 1990 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp18,2 triliun dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp22 triliun. Artinya capaian realisasi penerimaan pajak sebesar 120,6 persen dari target pemerintah.

Periode 1990-2001, realisasi penerimaan pajak selalu di atas target yang ditetapkan pemerintah. Tahun 1998 saat krisis ekonomi penerimaan pajak mencapai 140,4 persen. Periode 2002-2014 hanya dua kali realisasi penerimaan pajak sesuai target.”

Dengan naik turunnya persentase penerimaan pajak pertambahan nilai, hal ini dikarenakan Ditjen Pajak melakukan terobosan dengan cara memperluas basis pajak pada industri pengolahan serta meningkatkan administrasi perpajakan. Hal ini bisa dilihat dari persentase pada tahun 2013 penerimaan pajak pertambahan nilainya mengalami penurunan.

Self Assessment system umumnya diterapkan pada jenis pajak yang dimana wajib pajak tersebut cukup mampu untuk disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Dalam prinsip Self assessment System, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan sistem self assessment system adalah jumlah PKP terdaftar dan jumlah SSP yang disetorkan. Pemungutan dengan self assessment system dilakukan agar PKP dapat melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai PKP, membuat SPT yang dilaporkan dan SSP yang disetor. SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya, mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai dengan jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, SPT merupakan sarana yang handal bagi terciptanya tujuan perpajakan di Indonesia. Penggunaan sistem self assessment menuntun wajib pajak aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya.

Dengan argument-argumen tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh self assessment system pada para PKP dalam melakukan kewajiban PPN-nya terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti menetapkan judul bagi penulisan penelitiannya yaitu **“Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Jambi.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak Berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi?

2. Apakah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak Berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi?

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Untuk mempersempit masalah dan agar tidak menyimpang serta lebih terarah maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah, yaitu:

1. Sistem *self assessment* dalam penelitian ini dicerminkan dari variabel jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetorkan.
2. Batas lokasi penelitian adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.
3. Data yang diperoleh berdasarkan data sekunder, observasi serta wawancara tidak berstruktur tanpa menggunakan kuisioner.
4. Dasar penelitian penentuan variabel adalah tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *self assessment system* yang dicerminkan dari pertumbuhan jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetorkan pada Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh dari masing-masing ketiga variabel di atas terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan akhir ini adalah:

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang

diteliti, yaitu seberapa besar pengaruh Self Assessment System pada Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebagai informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini didalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Jambi.

## **2. Bagi Perusahaan**

Sebagai informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini didalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara pada KPP Pratama Jambi.

## **3. Bagi Pihak Lain**

Sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan akhir di masa yang akan datang dan juga masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas, khususnya untuk mahasiswa di tahun-tahun mendatang.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Jenis metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat *Studi Survey*. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif kausal, yaitu penelitian bertujuan menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya (Sugiyono, 2005:11). Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Permasalahan asosiatif adalah pernyataan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan melakukan:

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan yang erta hubungannya dengan masalah diteliti.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan bagian penerimaan pajak pertambahan nilai yang ada di dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.

## 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan cara membaca semua hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Data ini diperoleh dari buku-buku beserta referensin lainnya seperti jurnal dan yang lainnya.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi laporan akhir ini, serta memperlihatkan hubungan yang jelas antara bab satu dengan bab yang lainnya, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan dasar, arah dan permasalahan yang akan dibahas, dengan urutan yaitu: latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yang menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan pembanding. Teori-teori yang akan diuraikan adalah mengenai Pengertian Pajak, pengertian Pajak Pertambahan Nilai, subjek dan objek Pertambahan Nilai, tarif Pajak

Pertambahan Nilai, cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dan lainnya yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, identifikasi dan definisi operasional variabel penelitian, uji kualitas data dan model analisis serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab empat ini merupakan bagian terpenting dalam laporan akhir ini karena pada bab ini, penulis akan menganalisis data-data yang diperoleh dari perusahaan berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan. Analisis dilakukan dengan melakukan perhitungan dan analisis ilmu statistik dan dibantu dengan program SPSS untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan PKP, SPT, dan SSP terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada bab ini penulis menarik kesimpulan sebagai pemecahan dari permasalahan yang ada, kemudian penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat.